

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan pengembangan pariwisata memerlukan strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan secara terus menerus. Kebijakan tersebut diidentifikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kebijakan itu, pengembangan pariwisata di tingkat kabupaten/kota diatur dalam peraturan daerah. Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang potensial di Jawa Barat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah, bahwa visi pemerintah dalam pengembangan pariwisata daerah adalah mewujudkan daerah kabupaten sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis alam di Jawa Barat didukung oleh budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, menuju masyarakat yang taqwa, maju, dan sejahtera (Pemerintah Kab. Garut, 2019). Salah satu lokasi potensial yang menjadi unggulan dalam program pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut adalah Situ Bagendit. Dengan potensi yang dimilikinya, pemerintah provinsi Jawa Barat meyakini Situ Bagendit akan menjadi destinasi wisata yang mampu menarik banyak wisatawan setelah dilakukannya revitalisasi. Program revitalisasi tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi sejak akhir tahun 2020.

Pengembangan pariwisata dilakukan sedemikian rupa sehingga industri dapat meningkatkan kualitasnya agar dikenal dan diakui. Pengembangan pariwisata di suatu daerah akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial dan budaya. Mengembangkan interaksi sinergis antara *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata sangat penting untuk keberlanjutan pariwisata secara efektif (Heslinga et al., 2019). Hal itu sejalan dengan peta jalan pariwisata UNWTO tahun 2030 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu membutuhkan kemitraan yang diperkuat dan kerja sama antar *stakeholder* (Roxas et al., 2020). Dalam semua kegiatan pembangunan, para *stakeholder* memiliki sumber daya dan kepentingan sendiri yang mewakili dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang

optimal bagi pengembangan pariwisata suatu daerah (Ginting et al., 2021). Keterlibatan *stakeholder* mengarah pada perencanaan strategis pariwisata yang dapat diterima dengan baik, menghindari konflik yang timbul selama penerapan kebijakan, dan menyatukan orang-orang yang terlibat dalam bidang pariwisata (Wanner & Pröbstl-Haider, 2019).

Destinasi wisata yang dikelola dengan baik dapat menarik wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tanpa upaya yang berkelanjutan, jumlah kunjungan dan daya tarik destinasi dapat menurun yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada citra kawasan tersebut. Ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai penurunan wisatawan yang berkunjung salah satu contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Wiradipoetra dan Brahmanto (2016) yang menunjukkan bahwa kualitas destinasi wisata di wisata *outbond* Ciwangun Indah *Camp*, Bandung Barat menurut persepsi wisatawan rendah atau tidak menarik sehingga hal tersebut berpengaruh dengan rendahnya minat wisatawan. Selain itu, adapun penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan dan Fabanyo (2020) yang membuktikan kunjungan wisatawan ke Pantai Sulamadaha setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan fenomena tersebut, dalam pengembangan destinasi wisata, model siklus hidup kawasan pariwisata atau yang disebut dengan *tourism area life cycle (TALC)* telah dibahas secara luas dan diterima secara umum sebagai heuristik konseptual untuk memahami evolusi destinasi wisata (Rodrigo et al., 2023). Destinasi wisata dapat mengalami penurunan karena berbagai alasan seperti fasilitas yang kuno, operasional yang tidak memadai, perubahan preferensi wisatawan, dan persaingan dengan destinasi lain (Xu et al., 2022).

Sama halnya seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Poulomi dan Somnath (2024) yang menjelaskan bahwa proses evolusi pariwisata di destinasi wisata pegunungan Sikkim di Himalaya Timur hampir sesuai dengan yang didefinisikan model TALC dan berada dalam fase pembangunan, akan tetapi faktor-faktor yang dapat mengganggu kemajuan pembangunan pariwisata dapat berpotensi destinasi tersebut mencapai fase konsolidasi. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa cara-cara meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur dasar melalui peningkatan pembangunan kapasitas belum dijelaskan secara rinci.

Maka, diperlukan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, khususnya di destinasi wisata alam, untuk menawarkan pengalaman yang lebih khas dan otentik bagi wisatawan.

Model siklus hidup kawasan pariwisata yang dikemukakan oleh Butler (1980) mengasumsikan siklus pertumbuhan suatu destinasi wisata dengan tahapan yang dapat diidentifikasi yaitu eksplorasi (*exploration*), keterlibatan (*involvement*), pengembangan (*development*), konsolidasi (*consolidation*), stagnan (*stagnation*), penurunan (*decline*) dan peremajaan (*rejuvenation*). Teori ini menjelaskan bagaimana suatu destinasi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Penelitian ini akan berfokus pada tahap peremajaan (*rejuvenation*) bahwa sangat penting untuk mengembangkan rencana peremajaan untuk mendapatkan kembali daya tarik ketika destinasi wisata telah memasuki tahap stagnasi atau tahap penurunan. Rejuvenasi atau peremajaan dapat diartikan sebagai upaya pemulihan destinasi untuk menarik pengunjung. Fase ini dapat dicapai dengan menciptakan fasilitas baru yang layak dengan pembaharuan dan inovasi untuk kelangsungan suatu destinasi. Hal tersebut sama halnya dengan revitalisasi, kata revitalisasi memiliki arti yang mirip dengan rejuvenasi, revitalisasi berarti suatu proses, cara, atau tindakan untuk menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya. Dalam hal ini revitalisasi destinasi merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan suatu kawasan destinasi pariwisata yang mungkin telah mengalami penurunan dari popularitas, kondisi lingkungan, maupun fasilitas atau infrastruktur.

Persepsi dan sikap masyarakat terhadap dampak pariwisata merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan dan kebijakan untuk keberhasilan pengembangan pariwisata di masa depan (Simeoni et al., 2019). Dengan melakukan perubahan pada destinasi wisata dalam menciptakan alasan baru bagi wisatawan untuk kembali atau menarik wisatawan baru ke destinasi tersebut, merenovasi fasilitas, dan mengubah posisi citra destinasi karena citra suatu destinasi terbentuk dengan adanya perspektif yang berkembang di kalangan masyarakat terhadap realitas yang muncul dari destinasi itu sendiri (Simeoni et al., 2019). Citra destinasi mempengaruhi wisatawan selama pemilihan destinasi, evaluasi selanjutnya, dan niat berkunjung di kemudian hari. Citra destinasi juga memiliki pengaruh signifikan

terhadap nilai, kepuasan, dan loyalitas wisatawan (Novrianda & Shar, 2022). Dalam pengembangan pariwisata, perlu juga memerhatikan strategi pemasaran destinasi dengan maksimal. Keberhasilan pemasaran suatu destinasi ditentukan oleh daya tarik suatu destinasi tersebut dibandingkan dengan daya tarik destinasi wisata lainnya (Budi, 2018). Citra destinasi telah menjadi bagian dari pemasaran di sektor pariwisata. Cara menarik wisatawan untuk kembali atau merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain sangat penting untuk pengembangan destinasi (Asnawi et al., 2020). Dengan perkembangan pariwisata dan persaingan yang semakin ketat, citra destinasi telah menjadi perhatian industri. Hal ini dikarenakan persepsi terhadap citra destinasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata dan juga aspek penting dalam membangun strategi pemasaran destinasi pariwisata (Chen & Tsai, 2007). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa citra destinasi merupakan aspek penting yang mempengaruhi kepuasan wisatawan. Oleh karena itu penting bagi *stakeholder* pengelola kawasan wisata dalam menciptakan citra destinasi (Nurazizah & Marhanah, 2020).

Pada penelitian ini, permasalahan yang terjadi yaitu salah satu implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut belum optimal karena masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan yang berdampak pada minat kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Garut (Rizal, 2021; Rustiana et al., 2019). Permasalahan tersebut bisa dilihat dari konsep pengembangan 3A yaitu *attraction* (atraksi) yang tidak dikelola secara profesional, *accessibility* (aksesibilitas) berupa jalan menuju lokasi atau objek wisata yang sempit sehingga sering menimbulkan kemacetan atau jalan yang rusak, *amenities* (fasilitas) berupa sarana dan prasarana pada objek wisata yang belum dikelola dengan baik sehingga tampilan kurang menarik, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut untuk membangun dan mengembangkan potensi wisata, kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan, kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan masih rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat (Rizal, 2021).

Begitu juga dengan Situ Bagendit, saat ini Situ Bagendit sudah cukup terkelola dengan baik, namun belum terlaksana dengan maksimal karena

Pemerintah Kabupaten Garut tidak bisa bertindak sendiri dalam pengelolaan Situ Bagendit, diperlukan beberapa pihak yang harus aktif dan berkontribusi untuk mendukung pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan Situ Bagendit tersebut. Maka dari itu, pengembangan Situ Bagendit membutuhkan peran dan kontribusi pada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tarigan dan Thamrin (2023) yang menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata Kawasan Tao Silalahi, khususnya objek wisata Dermaga Apung telah diterapkan dengan baik. Komunikasi antar instansi pelaksana berjalan dengan baik, tetapi koordinasi belum optimal karena keterbatasan anggaran dan masalah sinkronisasi program antar instansi. Pada penelitian itu juga disebutkan bahwa keadaan sosial, ekonomi, dan politik belum optimal untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Pada periode 2015-2020 menunjukkan data jumlah wisatawan yang berkunjung ke Situ Bagendit mengalami penurunan (Rismanto & Solihat, 2023). Hal ini mungkin disebabkan karena wisatawan tidak mempunyai pengalaman berkesan setelah mengunjungi kawasan wisata Situ Bagendit, sehingga kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi kawasan wisata Situ Bagendit masih rendah. Hal ini menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan ke Situ Bagendit (Rismanto & Solihat, 2023). Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 juga membawa dampak negatif bagi Situ Bagendit. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Qadar et al. (2022) yang menjelaskan bahwa revitalisasi sektor pariwisata penting dilakukan pasca pandemi Covid-19. Fase kebangkitan industri pariwisata harus siap dilakukan untuk keberlangsungan sektor pariwisata tersebut. Namun, dalam penelitian tersebut umumnya hanya mengambil beberapa partisipan atau responden saja. Oleh karena itu, diperlukan juga untuk mengetahui perspektif dari semua *stakeholder* untuk melakukan revitalisasi suatu destinasi dengan baik dan maksimal.

Selain itu, masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan. Ini termasuk aturan atau kebijakan komprehensif tentang partisipasi dan masalah kemitraan antar *stakeholder*. Meskipun partisipasi pada dasarnya bertujuan untuk membantu satu sama lain, namun masalah yang ditemukan di lapangan bahwa partisipasi dalam pengelolaan wisata Situ Bagendit belum optimal dan belum bisa

memenuhi kriteria kemitraan (Purnawan et al., 2023). Di samping permasalahan tersebut, pada saat ini di tahun 2024 kawasan wisata Situ Bagendit sudah direvitalisasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan menata kawasan tersebut menjadi daya tarik wisata berstandar internasional. Tujuan dilakukannya revitalisasi ini pihak manajemen dengan dukungan pemerintah setempat sangat tertarik untuk mengembangkan kawasan wisata Situ Bagendit, oleh karena itu pihak manajemen bekerja sama dengan pemerintah melakukan beberapa strategi untuk menarik perhatian wisatawan, antara lain pembenahan infrastruktur dan pengelolaan dengan menetapkan Situ Bagendit sebagai kawasan wisata standar internasional.

Salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Xiaoyuan et al. (2023) yang menjelaskan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *stakeholder* pariwisata mendukung pembangunan pariwisata dengan mengeksplorasi peran yang dilakukannya dan manfaat yang dirasakan di sektor pariwisata. Penelitian tersebut juga telah menggunakan teori pemangku kepentingan namun ada kebutuhan untuk menggunakan teori tambahan dan ekstensif dalam penelitian selanjutnya. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut penting untuk memastikan bahwa perspektif dari *stakeholder* yang berbeda diungkapkan dan diperhatikan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian tersebut juga menggunakan metode kuantitatif, sehingga dibutuhkan metode kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pembangunan pariwisata. Pendekatan ini mencakup wawancara mendalam untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dari para *stakeholder*.

Pandangan para pemangku kepentingan pariwisata sangat menentukan dalam menjaga citra destinasi, oleh karena itu pemerintah harus mampu mempertahankan kondisi destinasi pariwisata dan memperbaiki citra negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif para pemangku kepentingan terhadap kawasan wisata Situ Bagendit yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dalam menentukan kebijakan atau peran apa yang harus diambil untuk meningkatkan reputasi dan citra kawasan wisata Situ Bagendit setelah dilakukan revitalisasi. Karena reputasi dan citranya yang baik maka Kabupaten Garut juga

akan mendapatkan manfaat dari sektor pariwisatanya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Analisis Perspektif *Stakeholder* Terhadap Revitalisasi Destinasi dan Implikasinya pada Citra Kawasan Situ Bagendit Kabupaten Garut”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *stakeholder* terhadap citra destinasi Situ Bagendit setelah revitalisasi?
2. Bagaimana peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di kawasan Situ Bagendit?
3. Bagaimana skenario pengembangan destinasi berdasarkan citra yang terbentuk setelah revitalisasi dan peran *stakeholder* di kawasan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis perspektif *stakeholder* terhadap citra destinasi Situ Bagendit pada saat sebelum revitalisasi dan setelah revitalisasi.
2. Menganalisis peran *stakeholder* dalam menentukan kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Situ Bagendit.
3. Menganalisis skenario pengembangan destinasi berdasarkan citra yang terbentuk setelah revitalisasi dan peran *stakeholder* di kawasan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh dengan topik yang serupa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pariwisata secara umum khususnya dalam peran *stakeholder* yang berkaitan dengan citra suatu destinasi.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat lebih bermanfaat jika dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pengembangan dan pengelolaan Situ Bagendit menjadi lebih baik.

1.5 Struktur Skripsi

Untuk lebih memahami keseluruhan isi laporan penelitian ini, peneliti membagi laporan menjadi lima bab. Kelima bab tersebut di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan konteks penelitian yang dilakukan, termasuk permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Peneliti menempatkan topik penelitian yang lebih luas dan dapat dikemukakan bahwa terdapat kesenjangan yang perlu diisi dengan mendalami topik yang akan diteliti. Menjelaskan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi dalam praktik, permasalahan yang muncul, dan fakta-fakta yang didapatkan. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi terkait teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan permasalahan penelitian, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang di antaranya desain penelitian, lokasi penelitian, partisipan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan etika penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh melalui analisis data yang dapat disesuaikan dengan urutan rumusan masalah penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian untuk memenuhi rumusan masalah yang diajukan pada bab 1.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan makna analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.